



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KOTA TANGERANG SELATAN

Gedung IFA Lt. 3, Jalan Raya Viktor BSD-Km.1 No.88 Buaran, Serpong Kota Tangerang Selatan

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 170/22/DPRD/2018

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan telah Menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017).

Memperhatikan

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- b. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor: 188.24/2837/Huk, Tanggal 27 November 2018. Perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Propempera di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;
- c. Kesepakatan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 170/11-Kesepakatan/DPRD/2018 dan 188/742-Huk tanggal 27 November 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 29 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ketua,



MOCH RAMLIE. MA

Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
 Nomor : 170 /22/ DPRD/2018
 Tanggal : 29 November 2018
 Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL / TITIK/ANG	MATERI POKOK	STATUS		DAJAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKASA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYEMPULAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		MA	Keu/Ke			
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Prinsip Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, PPDB, dan sistem Pendidikan Dasar, MI, ke Jenjang SMP	-	√	1. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP NO. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;	2018	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahapan I	Mencabut Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan	penyertaan modal berupa aset pasar	√	-	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 3. Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.	2018	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahapan I	Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan No.800/605-Disperindag tanggal 17 September 2018 perihal Usulan Perubahan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp. 9,99 M	√	-	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.	2018 Perubahan	-	BPKAD	Tahapan I	Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor 910/1158/EV/APBD tanggal 28 Agustus 2018 perihal Usulan Judul Rancangan Peraturan Daerah

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TITIK	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMBAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPILAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pod/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Kebijakan Pemerintah Pusat	√	-	UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	2018	-	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Tahapan I	-
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	√	1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.	2018	-	Dinas Pariwisata	Tahapan II	-
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Hymne Daerah	Penggunaan dalam acara Resmi Daerah amanat Perda No. 4 Tahun 2010	√	-	1. UU No.51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan; 2. Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah; 3. Peraturan Daerah NO.5 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah.	awal 2019	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahapan II	Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 430/3706/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Usulan Raperda Hymne Kota Tangerang Selatan

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYEMPULAN	KELE RANGKAIAN
				BARU	UBAH		NA	Pea/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah	1. Penyediaan lahan TPU oleh pemerintah rumah tapak dan rumah susun; 2. Jln Penggunaan petak makam.	√	-	-	-	√	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Tahapan II	-
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Ketahanan Keluarga	membangun karakter keluarga di Kota Tangerang Selatan	√	-	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	2018	-	DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan II	-
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Transportasi Perjalanan Haji	pembayaran terhadap perjalanan haji bagi Masyarakat Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji; 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler.	2018	-	DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan III	-
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Perlindungan Produk Lokal	jenis produk lokal asli Kota Tangerang Selatan	√	-	UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	2018	-	DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan III	-
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Corporate Social Responsibility / CSR	Dana Sosial dari perusahaan	√	-	1. UU Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 2. PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT.	2018	-	DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan III	-

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TITIK	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PENYALAHSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARUET PENTAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		MA	Res/Ket			
1.											
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Kewirausahaan	Usaha di Kota Tangerang Selatan	√	-	UU Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;	2018	-	DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan III	-
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba	√	-	1. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.	√	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahapan IV	-
14.	Rancangan Peraturan Daerah	Pembangunan Budaya Integritas	Pemerintahan Daerah yang bersih	√	-	UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi	√	-	DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan IV	-
15.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	pelaksanaan anggaran 2018	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 16 Ayat (4) dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah.	-	-	-	-	-
16.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Ringkasan Perubahan APBD, Rincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja, Daftar Jumlah Pegawai	√	-	1. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	-	-	-	-	-

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL / TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN RANGKAIAN
				BARU	UBAH		MA	Pen/Ket			
1											
17.	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020	Ringkasan APBD, Rincian APBD, Rekapitulasi, Daftar Jumlah, Penyertaan Modal	✓	-	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Pasal 16 Ayat (4) dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah. Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Ketua



MOCH RAMLIE, MA